**ANDI SUWIRTA
ARLIN ADAM**

Membincang Kembali Masalah Etnisitas, Nasionalitas, dan Integrasi Nasional di Indonesia

IKHTISAR: Proses genesis dan perkembangan nasionalisme di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Pengenalan sistem pendidikan modern pada awal abad ke-20 telah melahirkan golongan elite terdidik dan cendekiawan yang tercerahkan. Sekat-sekat etnisitas mulai mencair dan gambaran imajiner tentang negara-bangsa yang bernama “Indonesia” mulai diwacanakan dan diperjuangkan agar menjadi kenyataan. Proses modernisasi dan pembangunan pasca kemerdekaan melahirkan banyak harapan agar Indonesia merupakan “proyek bersama” bagi semua anak bangsa. Namun gejala ketidakpuasan terhadap proses dan hasil pembangunan juga muncul yang ditopang oleh akar-akar etnisitas yang kembali menguat. Masalah etnisitas, nasionalitas, dan integrasi nasional di Indonesia memiliki konteks historis yang khas. Akhirnya, diperlukan kearifan sejarah untuk bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara-bangsa yang maju, sejahtera, dan merdeka bagi semua anak bangsa di masa depan.

KATA KUNCI: Etnisitas, nasionalitas, golongan cendekiawan, negara-bangsa Indonesia, dan integrasi nasional.

ABSTRACT: The genesis process and nationalism development in Indonesia has its long journey and dynamic history. The introduction of modern education in the early 20th century has emerged the educated elite group and enlightened intellectuals. Ethnicity gaps have melted and an imagined community, i.e. “Indonesia”, has begun to be discussed and struggled in order to be realized. Modernization process and post-independence development have resulted in wishes to make Indonesia become “collective project” for all people of nation-state. However, the symptom of dissatisfaction on the development process and result appeared which were supported by ethnicity roots that were stronger. The problems of ethnicity, nationality, and national integration in Indonesia have particular historical context. Finally, it needs historical wisdom to realize Indonesia become progress, prosperous, and independent nation-state for all sons of nation in the future.

KEY WORD: Ethnicity, nationality, intellectual group, Indonesia nation-state, and national integration.

Andi Suwirta, M.Hum. adalah Dosen Senior di Jurusan Pendidikan Sejarah UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung; dan **Dr. Arlin Adam** adalah Dosen Senior di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UVRI (Universitas Veteran Republik Indonesia) di Makassar. Alamat emel: aspensi.bandung2006@gmail.com

PENDAHULUAN

Abad ke-20 M (Masehi) sering disebut sebagai “abad nasionalisme”, sebab pada kurun waktu itu marak munculnya pemikiran tentang nasionalisme dan gerakan untuk mewujudkan negara-bangsa (*nation-state*). Kesadaran nasional di Indonesia sendiri mulai muncul pada awal abad ke-20 dan mencapai puncak perjuangan untuk mewujudkan negara nasional pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ini kita menyaksikan munculnya fenomena baru, yakni disintegrasi negara nasional sebagaimana ditunjukkan oleh bubarnya Negara Uni Sovyet dan Yugoslavia. Banyak pertanyaan yang muncul: akankah negara-bangsa yang lain, termasuk Indonesia, mengalami nasib sejarah yang sama?

Tulisan ini mengkaji tentang perjalanan sejarah nasionalisme di Indonesia ditinjau dari berbagai perspektif. Memahami nasionalisme Indonesia harus disusur-galur proses genesis dan dinamika pertumbuhannya sampai sekarang. Dengan begini maka bisa dikenali sisi persamaan dan perbedaannya dengan negara-bangsa lain, termasuk juga kekuatan dan kelemahannya sehingga kita bisa menarik pelajaran yang berharga dari sejarah perjalanan bangsa, tanpa harus terjebak dalam generalisasi tentang fenomena *the end of nationalism* atau masa berakhirnya nasionalisme pada awal abad ke-21 ini. Dalam tulisan ini dibincangkan juga proses genesis dan perkembangan etnisitas dan nasionalitas Indonesia, serta dilihat juga teori-teori yang berkenaan dengan etnisitas, nasionalitas, dan integrasi nasional di Indonesia.¹ Maksudnya adalah untuk memberi kesadaran pada kita, bangsa Indonesia, bahwa masalah etnisitas dan nasionalitas adalah “kata kerja”, bukan kata benda, yang akan terus berproses secara dinamis hingga sekarang.

ALUR NASIONALISME DI INDONESIA: DARI ETNISITAS KE NASIONALITAS

Pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Indonesia bisa dianalisis, baik dengan mengikuti alur linier, gerak bandul jam (pendulum), maupun alur spiral. Alur “linier” dari nasionalisme Indonesia dapat dijelaskan dengan melihat kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah entitas negara-

¹Tulisan ini, sebelum diperbaiki dalam bentuknya sekarang, merupakan makalah Jawaban UTS (Ujian Tengah Semester) pada matakuliah “Etnisitas, Nasionalitas, dan Integrasi Nasional” yang diberikan oleh Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja di Program Studi Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) Sekolah Pascasarjana UPI (Universitas Pendidikan Nasional) pada tahun 2002. Kami mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Rochiati Wiriaatmadja atas kuliah-kuliahnya yang membangkitkan minat akademik dan menantang pemikiran kritis. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam tulisan ini tetap menjadi tanggung jawab akademik kami berdua.

bangsa (*nation-state*) yang majemuk, terdiri dari berbagai etnis, agama, bahasa, ras, dan adat-istiadat. Dalam perkembangannya, berbagai etnis dengan segala atribut sosialnya itu saling berinteraksi karena tersedianya jaringan pelayaran, perdagangan, perkebunan, pembangunan sarana transportasi dan komunikasi, serta pembukaan lembaga-lembaga modern seperti sekolah, birokrasi, dan pers. Interaksi antar etnis dengan atribut sosialnya dalam sebuah ruang modernitas itu – secara sosiologis – telah melahirkan perubahan solidaritas antar etnis dari yang bersifat mekanis menjadi solidaritas organis. Individu dan atau kelompok sosial membangun solidaritas dan integrasi karena adanya persamaan kepentingan, profesi, dan status social (Ritzer, 1992:80-81). Solidaritas dan integrasi sosial antar etnis ini pada gilirannya melahirkan semangat kebangsaan dan integrasi nasional.

Meminjam analisisnya Karl W. Deutsch, pertumbuhan suatu negara-bangsa acapkali terjadi melalui proses penggabungan suku-suku bangsa (*etnisitas*) menjadi bangsa (*nation*). Ketika menjelaskan tentang *nation and national integration*, ia selanjutnya menyatakan bahwa: “*a nation is the result of the transformation of a people, or of several ethnic elements, in the process of social mobilization*” atau, terjemahan bebasnya, sebuah bangsa adalah hasil transformasi dari rakyat, atau dari beberapa unsur suku, dalam proses mobilisasi sosial (Deutsch, 1984:18). Fakta-fakta sejarah di Indonesia juga menyatakan bahwa sebelum pemerintah kolonial Belanda menerapkan sistem birokrasi, perkebunan, sarana transportasi, dan pendidikan modern pada abad ke-19, masyarakat Indonesia hidup dalam kesadaran etnisitas. Kesadaran tersebut hanya meliputi wilayah tertentu dengan kategori sosial seperti suku bangsa, agama, bahasa, dan ras yang juga terbatas.

Karena proses modernisasi maka terjadilah mobilitas sosial, baik secara horizontal maupun vertikal. Mobilitas sosial ini telah menciptakan kesadaran dan kepentingan yang bersifat etno-nasionalisme seperti nampak dalam fenomena lahirnya paguyuban-paguyuban etnik pada awal abad ke-20. Kelahiran *Jong Java*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Ambon*, dan lain-lain yang kemudian berubah dan menjelma menjadi organisasi-organisasi nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, *Indische Partij*, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya adalah manifestasi dari fenomena etno-nasionalitas tersebut (Kartodirdjo, 1993:5-8).

Dengan begini telah terjadi perubahan kesadaran dan perjuangan dari yang bersifat etnisitas – karena proses modernisasi, birokratisasi, liberalisasi, dan monetisasi dengan segala implikasi sosialnya – ke arah nasionalitas yang bermuara pada kesadaran dan perjuangan nasional sebagaimana ditunjukkan, baik oleh manifesto politiknya organisasi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925 di negeri Belanda, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 di Jakarta, maupun dalam perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan RI (Republik

Indonesia) pada tahun 1945-1950 (Kahin, 1970). Kesadaran dan perjuangan yang bersifat nasional itu berkisar pada pentingnya kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, kemerdekaan, persamaan di depan hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu alur “pendulum” (gerak bandul jam) antara etnisitas dan nasionalitas di Indonesia dapat dijelaskan karena dinamika sejarah bangsa Indonesia yang dalam proses perkembangannya mengalami fenomena *sentripetal* atau kecenderungan integrasi dan *sentrifugal* atau kecenderungan disintegrasi (Sjamsuddin, 1998:53-6). Gerak yang dinamis di antara dua kutub itu kiranya dapat digambarkan bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, fenomena etnisitas cukup marak yang ditandai oleh kuatnya perasaan kedaerahan dan kesadaran “bangsa” dalam pengertian etnis. Kesadaran etnisitas ini – karena proses pendidikan sebagai wahana pembuka vista kesadaran dan harga diri di satu sisi, dan di sisi lain karena sistem sosial yang diskriminatif dalam tatanan hubungan kolonial yang hegemonik – mulai berubah menuju ke arah nasionalitas. Nasionalisme yang ditandai oleh fenomena sentripetal dan integrasi nasional itu terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 dan pada momentum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Periode pasca revolusi Indonesia, terutama tahun 1950-an, karena adanya semangat kebebasan dan kemandirian serta lemahnya kontrol pemerintah Pusat di Jakarta mulai muncul gejala sentrifugal dan disintegrasi bangsa yang ditandai oleh maraknya perlawanan-perlawanan kedaerahan terhadap pemerintah pusat. Peristiwa pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia), dan PERMESTA (Perjuangan Semesta), baik di Jawa maupun di Sumatera dan Sulawesi menunjukkan fenomena kentalnya aroma kedaerahan (etnisitas) pada tahun 1950-an. Kemudian pada masa Demokrasi Terpimpin di bawah regim Orde Lama (Soekarno) dan zaman Demokrasi Pancasila di bawah Orde Baru (Soeharto) – yang diinterupsi oleh Peristiwa G-30-S (Gerakan 30 September) tahun 1965, suatu tragedi nasional paling berdarah dalam sejarah Indonesia modern (May, 1978:91-128) – sejak tahun 1960-an sampai tahun 1990-an pendulum mulai bergerak ke arah sentripetal dan integrasi nasional.

Trilogi Pembangunan pada masa Orde Baru yang ditopang oleh tiga pilar kekuatan utama: militer, teknokrat, dan birokrat menjadikan Indonesia bukan saja merupakan negara nasional (*nation state*) yang kuat tetapi juga telah menjelma menjadi negara birokrat (*beamtenstaat*) yang terpusat (Robison, 1990; dan Bresnan, 1993). Dan pemerintah Orde Baru yang sentralistis dan sarat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) ini – karena lemahnya kekuatan lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen, hukum, pers, dan partisipasi masyarakat – pada tahun 1990-an mulai ambruk dan mencuatkan fenomena euforia kebebasan atas nama

Gerakan Reformasi di mana masalah etnisitas dan otonomi daerah kembali menguat (Winters, 1999). Gerak pendulum jam kini sedang menuju ke titik ekstrim kanan (dari nasionalitas dan integrasi nasional menuju ke etnisitas dan disintegrasi nasional). Kapankah gerak pendulum itu akan kembali ke titik nasionalitas dan integrasi nasional, diperlukan waktu dan jawaban yang tenang.

Dan akhirnya dinamika nasionalitas dan integrasi nasional di Indonesia bisa juga mengikuti alur “spiral”, sebagai sebuah model yang relevan dan fungsional. Model ini cukup dinamis dan bersifat progres yang ditandai oleh adanya perubahan menuju ke arah kemajuan. Perubahan etnisitas menuju ke nasionalitas disebabkan oleh adanya proses modernisasi, mobilitas, dan perubahan sosial. Tahapan-tahapan perubahan itu begitu dinamis – suatu tarik-ulur antara etnisitas dan nasionalitas; atau antara sentrifugal dan sentripetal – namun terus menuju ke arah perkembangan integrasi nasional yang lebih maju. Terjadi pula *shift* (pergantian) dalam memaknai nasionalisme dan integrasi nasional dalam paradigma baru sehingga tetap relevan dengan tantangan dan kebutuhan zaman.

Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada zaman kolonial, zaman pergerakan nasional, zaman kemerdekaan, dan zaman pasca kemerdekaan memiliki dinamikanya sendiri – baik sentripetal maupun sentrifugal – menuju ke arah perubahan yang lebih baik dan maju. Begitu juga dengan tatanan dan struktur masyarakat Indonesia dari yang bersifat agraris menuju ke arah industrialisasi dan teknologi informasi memiliki kesadaran nasional dan dinamika perubahan yang berbeda sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman, namun tetap menuju ke arah kemajuan. Pendek kata, model “spiral” ini menunjukkan alur perubahan zaman. Dan tiap zaman memang menghadirkan tantangan dan karakteristiknya sendiri. Akhirnya tiap generasi juga berhak untuk membuat sejarahnya sendiri sesuai dengan tuntutan dan jiwa zaman, termasuk dalam memaknai etnisitas, nasionalitas, dan kesadaran akan integrasi nasionalnya.

Negara yang mengikuti alur “spiral” dalam dinamika nasionalitasnya lebih relevan untuk negara-negara yang telah mengalami perubahan sosial dalam struktur masyarakatnya, misalnya dari negara dengan corak masyarakat yang agraris menuju ke negara industri atau informasi. Perubahan struktur ini akan diikuti oleh perubahan kultur, termasuk kesadaran tentang nasionalitasnya (Laucer, 2001). Bagi masyarakat Jepang yang agraris pada sebelum abad ke-19, misalnya, akan memiliki kultur dan kesadaran nasional yang berbeda dengan masyarakat Jepang abad ke-20 dan abad ke-21 yang telah memasuki negara industri dan bahkan pasca

industri. Masalah etnisitas, nasionalitas, dan kesadaran akan integrasi nasionalnya tetap ada namun dimaknai dan direspons secara berbeda sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Begitu juga dengan negara-negara di Asia lainnya yang tengah bersiap-siap untuk memasuki masyarakat industri, tentu saja akan mengalami perubahan yang dinamis dan maju dalam memecahkan masalah-masalah nasionalitas dan integrasi nasionalnya.

Apabila dinamika kasus pendulum telah mencapai equilibriumnya kembali, maka bentuk nasionalisme yang terjadi akan tetap berkembang karena aura nasionalitas sedang terpancar luas dan integrasi nasional sedang mencapai soliditasnya yang tinggi. Keadaan ini akan bisa dipertahankan manakala negara kebangsaan (*nation state*) dibayangkan dan dirasakan bersama manfaatnya sebagai entitas politik yang memberikan kepada semua warga negara kesempatan dan hak-hak yang sama, adanya kepastian dan perlindungan hukum, kebasan dan demokrasi, serta jaminan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Keadaan nasionalitas dan integrasi nasional akan mengalami stagnan dan mandeg manakala momentum negara kebangsaan sebagai “proyek bersama” itu tidak disadari dan kurang ditekankan. Kondisi ini akan ditandai oleh sikap apatisme dan sinisme tentang nasionalisme, kurangnya partisipasi sosial warga negara dalam mengusung negara kebangsaan, serta tiadanya rasa memiliki (*sense of belonging*) warga negara terhadap negara kebangsaannya. Lebih-lebih jika negara kebangsaan itu tidak menunjukkan prospeknya sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) – karena banyak faktor, di antaranya pemerintahan yang korup, otoriter, sewenang-wenang, serta tidak profesional dan kurang membanggakan – maka nasionalitas dan integrasi nasional itu akan mengalami regresi dan kemuduran.

Keadaan seperti ini akan ditandai oleh proses resistensi masyarakat (*society*) *vis a vis* negara (*state*), maraknya protes sosial di daerah-daerah, lunturnya kebanggaan (*sense of pride*) dan penghormatan pada lambang-lambang negara kebangsaan, dan bahkan adanya keinginan untuk melepaskan diri dari koridor negara kebangsaan itu sendiri. Untuk kasus Indonesia, itulah yang sejak tahun 1970-an hingga sekarang munculnya GAM atau Gerakan Aceh Merdeka (Sulaeman, 2002) dan OPM atau Organisasi Papua Merdeka (Rawiyae, 2002).

NASIONALISME *SUBALTERN* ANTARA SEBELUM DAN SESUDAH KOLONIALISME

Membicarakan tentang nasionalisme juga perlu menyinggung tentang “teori *subaltern*”. Teori nasionalisme *subaltern* ini dicetuskan oleh Gayatri Spivak pada tahun 1985 dalam artikelnya “Can *Subaltern* Speak?” atau

Dapatkah *Subaltern* Berbicara? Menurut Gayatri Spivak, yang dimaksud dengan *subaltern* adalah subjek yang tertekan, seperti para anggota kelas-kelas *subaltern*-nya Antonio Gramsci; atau secara lebih umum *subaltern* adalah mereka yang berada di tingkat inferior (dalam Gandhi, 2001:1).

Dalam perspektif historiografi, *subaltern studies* ini mendefinisikan diri sebagai upaya yang pada akhirnya memungkinkan “masyarakat inferior” untuk berbicara dalam halaman-halaman buku sejarah yang didominasi oleh kaum elite; dan dalam melakukan hal ini maka suara-suara yang selama ini terbungkam dari mereka yang benar-benar tertindas dapat berbicara atas nama dan suara mereka sendiri (Gandhi, 2001:2). Dengan perkataan lain, teori nasionalisme *subaltern* adalah kritik terhadap *genre* historiografi yang bersifat kolonialis atau penjajah sentris, tanpa memberi hak sedikitpun kepada mereka yang terjajah untuk tampil bersuara dan berperan dalam panggung sejarah mereka sendiri.

Teori *subaltern*-nya Gayatri Spivak ini pada mulanya menggambarkan *image* kaum wanita – sebagaimana terefleksikan dalam karya-karya sastra – yang menanggung beban ganda akibat dijajah oleh kekuasaan-kekuasaan kolonial dan disubordinasikan, baik oleh kaum laki-laki kolonial maupun pribumi. Menurut Gayatri Spivak, kaum wanita sebagai *subaltern* jelas tidak bisa berbicara karena tidak ada telinga baik dari kaum laki-laki kolonial maupun pribumi, yang bersedia untuk mendengarkannya. Dalam konteks ini – karena dominasi kaum laki-laki – maka kaum wanita ditakdirkan untuk “diam”. Dan agar kaum wanita itu dapat berbicara maka diperlukan kesadaran baru untuk mengkritisi dan perjuangan untuk mendobrak hubungan antara dominasi-subordinasi dan penjajah-terjajah yang tidak manusiawi itu (dalam Selden & Widdowson, 1993:193-197).

Jika dielaborasi lebih jauh, teori *subaltern*-nya Gayatri Spivak ini sesungguhnya berbicara tentang hubungan antara penjajah-terjajah dan dominasi-subordinasi, terutama antara penjajah Inggris dengan masyarakat yang terjajah di India. *Image* Inggris yang dicitrakan sebagai superior, beradab, cerdas, makmur, santun, dan rasional begitu kontras disandingkan dengan *image* India yang serba buram: inferior, biadab, bodoh, miskin, kasar, dan mistis. Dengan begini seolah-olah sudah menjadi hukum karma yang harus diterima tanpa *reserve* bahwa Inggris yang superior itu mengemban tugas mulia untuk menjajah dan menguasai India serta memperkenalkan pintu gerbang modernitas bagi masyarakat India yang dikuasanya dan dipandang masih inferior itu.

Namun hubungan hegemonik yang eksploitatif dan diskriminatif itu mulai dipertanyakan, digugat, dan didobrak oleh golongan muda, terpelajar, dan berkenalan dengan peradaban Barat. Dari sinilah nasionalisme dan gerakan nasional yang digerakkan oleh golongan muda terpelajar itu bermula. Gerakan mereka tidak hanya mengkritisi tatanan hubungan kolonial yang eksploitatif dan sistem sosial yang diskriminatif

tetapi juga mereka mencita-citakan perlunya kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan sebuah negara bangsa dalam hubungan antar bangsa yang bermartabat dan sederajat.

Tentu saja teori nasionalisme *subaltern* ini tidak hanya fenomena India, tetapi juga berlaku di negeri-negeri jajahan lain – dengan berbagai variasinya – baik di Asia, Afrika, maupun di Latin Amerika. Untuk kasus Asia Tenggara misalnya, sebagaimana ditunjukkan oleh Benedict Anderson (2002), teori nasionalisme *subaltern* ini juga menemukan relevansinya. Kelas menengah di Indonesia, Thailand, Philipina, dan negara lain di Asia Tenggara – yang umumnya muda, terpelajar, dan berasal dari kelas sosial terpendang – tidak puas dengan sistem sosial dan tatanan hubungan kolonial yang diciptakan oleh bangsa-bangsa Barat (Inggris, Perancis, Belanda, Spanyol, dan Amerika Serikat). Mereka berjuang untuk terwujudnya tatanan dan sistem sosial yang egaliter, hukum yang tidak diskriminatif, pemerintahan yang demokratis, kebebasan bersuara baik lisan maupun tulisan, dan negara kebangsaan yang berorientasi kesejahteraan atau *welfare state* (Adam, 2002). Dengan perkataan lain, golongan elite sosial terpelajar dalam sistem kolonial – yang dipandang sebagai kelompok *subaltern* itu – ingin berperan dan menentukan nasib sendiri tentang masa depan negara bangsanya dalam panggung sejarah yang sedang mereka jalani pada zamannya.

Gambaran tentang kelompok *subaltern* dan munculnya gerakan nasionalisme ini dengan jelas terlihat dalam video-film *A Passage to India* (Sebuah Perjalanan ke India), karya F.M. Forrester yang memang sangat menarik dan bernilai historis. Secara umum, kesan setelah menyaksikan video-film ini adalah sebuah gambaran yang mendalam tentang hubungan antara penjajah (Inggris) dengan terjajah (India), suatu hubungan yang bersifat hegemonik di mana penjajah (Inggris) sebagai kelompok yang berkuasa dengan segala superioritasnya dibandingkan dengan pihak terjajah (India) yang dikuasai dan tak berdaya dengan segala inferioritasnya. Dari hubungan antara penjajah-terjajah yang bersifat hegemonik ini memunculkan apa yang disebut *dominasi* dan *subordinasi*.

Inggris yang mendominasi ingin tetap terus mempertahankan kekuasaannya di India dengan hak-hak istimewa dalam sistem sosial dan kolonial yang eksploitatif dan diskriminatif. Sementara itu India yang menjadi subordinasi – dengan adanya golongan elite terpelajar yang muda dan tercerahkan karena sudah mengenyam sistem pendidikan Barat – mulai mempertanyakan secara kritis tatanan hubungan kolonial yang hegemonik dan tidak adil itu.

Alur cerita dalam video-film *A Passage to India* sendiri menggambarkan sosok seorang hakim muda (Haeslop), perwira polisi Inggris (Mayor Cellender), kepala administrasi (Turton), dan jaksa penuntut umum (McBryde) yang bertugas di India pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan pola pikir, sikap, dan perilaku yang konservatif khas kolonial

Inggris. Sementara itu mulai muncul pula kelompok elite sosial terpelajar dan muda yang kritis pada sistem sosial dan tatanan hubungan kolonial yang hegemonik itu. Mereka pada umumnya adalah para dokter (dr. Azis, dr. Muahammad Ali, dan kawan-kawannya) serta sarjana hukum (Amritrao, tokoh nasionalis terkenal dan legendaris yang anti Inggris). Mereka menyaksikan dan prihatin dengan sistem hukum yang semena-mena ketika hakim muda Inggris itu memutuskan begitu saja – tanpa prosedur dan proses peradilan yang fair – seorang India yang dijatuhi hukuman kerja paksa selama dua bulan. Mereka juga merasakan diskriminasi sosial ketika tempat hiburan umum (pertunjukan opera) hanya untuk orang kulit putih (Inggris) dan tidak untuk orang kulit berwarna (India). Dan mereka juga menerima akibat dari perilaku sosial yang arogan ketika orang-orang Inggris itu (Turton, Mayor Cellender, Haeslop, dan McBryde) dalam iring-iringan rombongan, mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi di tengah-tengah keramaian banyak orang sehingga sepeda yang dikendarai oleh dr. Azis dan dr. Mohammad Ali pun (dua tokoh nasionalis muda dan terpelajar di India) tersenggol dan terpental karenanya.

Puncak dari kesewenang-wenangan Inggris (sebagai penjajah) dan ketidakpuasan India (sebagai terjajah) nampaknya diperlihatkan ketika terjadi proses pengadilan terhadap dr. Azis yang dituduh memperkosakan nona Quested (kekasih Haeslop, hakim muda Inggris) hanya atas dasar laporan sepihak dari istri Mayor Cellender. Dalam pengadilan yang ramai dikunjungi oleh banyak orang itu diperlihatkan munculnya semangat *subaltern* India yang tidak puas dengan sistem kolonial Inggris yang hegemonik. Ketika jaksa penuntut umum (McBryd) tetap menuduh dr. Azis bersalah dengan pernyataan yang bersifat rasial bahwa “*orang yang berkulit gelap selalu tertarik dengan yang berkulit terang*”, pernyataan itu diinterupsi secara sinis oleh Amritrao, pembela terdakwa dr. Azis, dengan menyatakan bahwa “... *padahal wanita [kulit putih] itu lebih jelek dari lakinya [kulit berwarna]*”, dan segera saja disambut oleh gelak tawa para hadirin di ruang sidang pengadilan. Akhirnya karena bukti-buktinya tidak kuat dan nona Quested sendiri menarik pernyataannya, maka dr. Azis dibebaskan dari segala tuduhan. Dan ini dipandang sebagai kemenangan besar dari semangat nasionalisme India atas kesewenang-wenangan sistem kolonial Inggris. Para tokoh pergerakan nasional dan rakyat India berpesta menyambut kemenangan ini.

Kalaupun ada kritik terhadap video-film ini, barangkali adalah karena alur ceritanya yang datar-datar saja. Kami tadinya menyangka dan berharap bahwa proses pengadilan dr. Azis yang dituduh semena-mena itu akan menjadi klimaks dari perjuangan yang seru antara nasionalisme India melawan kolonialisme Inggris. Ternyata tidak ada perdebatan yang menegangkan dan meyakinkan antara Amritrao, ahli hukum terkenal dan tokoh nasionalis India dengan McBryd, jaksa penuntut umum Inggris.

Amritrao banyak diam dan hanya sekali-kali nyeletuk secara sinis kepada jaksa Inggris itu. Dan dr. Azis yang sudah tegang juga sepertinya dibebaskan begitu juga secara mudah. Kurang nampak sikap kolot, reaksioner, dan konservatif dari sistem kolonial Inggris dalam ruang pengadilan itu. Mungkin F.M. Forrester, penulis *A Passage to India* ini, ingin menunjukkan sisi lain dari wajah kemanusiaan sistem kolonial Inggris di India. Dalam kelamnya sistem kolonial masih ada secercah cahaya kemanusiaan. Dan itu ditunjukkan oleh kebaikan hati nona Quested yang menarik pernyataannya bahwa dia tidak diperlakukan senonoh oleh dr. Azis, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh jaksa.

Akhirnya, kami kira, fenomena ketidakpuasan golongan elite terpelajar – sebagai kelompok *subaltern* – kepada tatanan kolonial yang tidak adil itu juga tidak hanya khas India. Di Indonesia pun – sebagaimana ditunjukkan oleh karya sastra *tetralogi*-nya Pramoedya Ananta Toer (1985, 1986, 1987, dan 1988) – muncul juga perasaan tidak puas, tertekan, dan usaha perlawanan karena sistem sosial yang diciptakan oleh pihak kolonial Belanda begitu diskriminatif, represif, dan eksploitatif (Anderson, 2002:514-593). Kisah tokoh-tokoh nasionalis Indonesia yang terbiasa menghadapi pengadilan, *bui* dan penjara, serta pembuangan baik *internir* maupun *eksternir*, menghiasi sejarah perjuangan bangsa kita (Shiraishi, 1997:159-236).

Kesan bahwa negara kolonial adalah negara polisi yang selalu memata-matai dengan perangkat hukumnya yang tidak adil juga nampak dalam karya sastranya Soewarsih, *Manusia Bebas* (1979), yang menceritakan nasib seorang guru sekolah menengah dan keluarganya pada zaman kolonial Belanda (tahun 1930-an yang terkenal dengan zaman *rust en order*). Guru yang nasionalis dan mencita-citakan kemerdekaan itu terus diburu oleh polisi Belanda karena dinilai *de outer gareel* (berada di luar jalur) tatanan kolonial yang sudah mapan dan normal. Kalau saja karya-karya sastranya Pramoedya Ananta Toer, kisah herorik para tokoh pergerakan nasional Indonesia, dan karya Soewarsih ini divedeo-filmkan – sebagaimana *A Passage to India*-nya F.M. Forrester – kami kira juga akan menarik dan bernilai historis.

DI SEKITAR TEORI NASIONALISME: DARI HANS KOHN HINGGA BEN ANDERSON

Proses genesis pemikiran dan gerakan nasionalisme di Indonesia memang panjang, setidaknya merentang sejak awal abad ke-20 M (Masehi) hingga sekarang. Proses kelahirannya juga tidak lepas dari kedudukan dan peranan golongan elite yang terdidik dan kemudian menjadi cendekiawan. Sebagaimana diketahui bahwa golongan cendekiawan di Indonesia ini lahir pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 akibat diperkenalkannya sistem pendidikan, pemerintahan, dan kebudayaan Barat (dalam hal ini Belanda).

Golongan ini berasal dari klas bangsawan – baik tinggi maupun rendah – yang dijadikan oleh Belanda sebagai batu sendi utama untuk berjalannya sistem kekuasaan kolonial (Sutherland, 1984).

Proses pendidikan Barat, dengan demikian, merupakan unsur penting – di samping asal-usul status sosial – sebagai katalisator bagi munculnya golongan cendekiawan di Indonesia. Sebelum Politik Etis atau *Ethisce Politiek* dicanangkan pada awal abad ke-20, di mana pendidikan menjadi unsur utamanya, pemerintah kolonial Belanda telah membuka sekolah-sekolah untuk pamong praja seperti MOSVIA atau *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*, sekolah guru seperti KS atau *Kweek School*, dan sekolah dokter pribumi seperti STOVIA atau *School Tot Opleiding van Indische Artsen*. Setelah itu disusul dengan sekolah-sekolah lain untuk menghasilkan para teknisi seperti THS atau *Technische Hoge School* dan sarjana hukum seperti RHS atau *Rechts Hoge School*. Untuk bisa mencapai jenjang pendidikan ini, pemerintah kolonial Belanda membangun pendidikan dasar seperti HIS atau *Hollands Inlandse School* dan pendidikan menengah seperti MULO atau *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*, AMS atau *Algemene Middelbare School*, dan HBS atau *Hogere Burger School* (Brugmans, 1938).

Pada awal abad ke-20, setelah diperkenalkannya Politik Etis, mulai terbentuk golongan cendekiawan yang merupakan komunitas sosial yang kritis dan sadar terhadap kedudukan mereka di tengah-tengah masyarakat kolonial yang penuh dengan kontradiksi sosial (Brugmans, 1987:176-194). Mereka umumnya adalah para dokter, pamong praja, sarjana hukum, insinyur, dan guru. Betapapun status sosial mereka cukup terpandang di mata masyarakat – akibat proses pendidikan Barat yang dilaluinya – tetapi mereka merasakan diskriminasi dan penghargaan sosial yang tidak semestinya dari pemerintah kolonial Belanda.

Sadar akan hak-hak sosial mereka yang terabaikan oleh sistem kolonial yang diskriminatif, represif, dan eksploitatif, mereka mulai memperjuangkan – melalui organisasi pergerakan nasional – tentang kebebasan dan mencita-citakan sebuah negara kebangsaan yang demokratis, maju, sejahtera, dan berkeadilan. Mereka memiliki cita-cita dan bayangan komunitas politik (*an imagined political community*) tentang negara kebangsaan yang sama karena dipicu oleh nasib, kepentingan, pengalaman bertugas, pendidikan, dan saling berbagi wawasan, baik dalam bentuk tulisan di media massa, dalam perdebatan, dan kongres, maupun dalam forum *vergadering* atau sering juga disebut sebagai pertemuan umum (Shiaraishi, 1997). Mereka membangun wacana tentang negara kebangsaan yang demokratis dan identitas ke-Indonesiaan yang modern sebagai antitesa terhadap negara kolonial yang represif dan konservatif. Pendek kata, golongan cendekiawanlah yang menggagas, mencita-citakan, membangun *image*, dan berusaha mewujudkan negara nasional Indonesia yang maju, sejahtera,

dan merdeka – sebuah komunitas politik yang semula hanya dibayangkan dan disosialisasikan kepada anggota masyarakat bangsanya.

Sementara itu, studinya Robert Van Niel tentang *Munculnya Elite Modern Indonesia* (1984) juga menarik untuk dikemukakan. Studi ini berhasil memotret munculnya golongan terpelajar sebagai cikal-bakal dari para pelopor gerakan nasional Indonesia. Mereka adalah anak-anak para bangsawan tinggi (sultan, raja, dan bupati) yang disekolahkan di MOSVIA untuk menjadi pegawai pamong praja sebagai bagian dari mesin birokrasi pemerintah kolonial Belanda. Di antara mereka ada juga yang berpikiran “maju”, dalam artian selain menjadi bagian dari sistem pemerintahan kolonial Belanda juga hirau dengan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, seperti nampak dalam kasus para bupati di Banten, Sumedang, Tasikmalaya, dan Ciamis (Marlina D., 2001; dan Supriatna, 2002). Namun citra mereka yang umumnya dicap sebagai “kaki tangan kolonial” – karena bekerja sebagai pejabat pribumi dalam sistem pemerintahan kolonial Belanda – agak sulit untuk secara bebas dan penuh semangat memperjuangkan nasionalisme Indonesia.

Pada tahun 1901-1914, setelah Politik Etis dijalankan, muncul golongan elite baru yang agak lain dengan golongan elite terdahulu (Van Niel, 1984:50-138). Mereka umumnya adalah anak-anak para bangsawan rendahan (wedana, camat, guru, dan pegawai kecil) atau anak-anak pedagang menengah kaya yang atas kemauan anak-anak mereka sendiri tidak memilih MOSVIA sebagai pilihan studi, melainkan STOVIA untuk menjadi seorang dokter pribumi atau profesi yang bebas di luar birokrasi pemerintah. Mereka dimasukkan ke dalam golongan elite baru dengan ciri-ciri memiliki kemandirian, kebebasan, harga diri, peka terhadap lingkungan sosial sekitar, dan punya orientasi yang berbeda dengan golongan elite lama. Orang-orang muda dan terpelajar yang umumnya berprofesi sebagai dokter, advokat, guru, wartawan, insinyur, dan pedagang inilah yang memelopori gerakan nasional di Indonesia. Melalui organisasi pergerakan yang mereka bentuk dengan pers sebagai salah satu medianya, mereka mulai mengkritisi sistem sosial dan tatanan kolonial yang tidak adil di satu sisi dan di sisi lain mereka juga menggagas nasionalisme dan tatanan negara kebangsaan yang mereka bayangkan dan mereka cita-citakan bersama.

Golongan elite baru inilah yang dalam perkembangannya kemudian menjadi tokoh-tokoh utama pergerakan nasional, arsitek negara nasional, dan pelaku-pelaku penting dalam negara nasional yang telah mereka bayangkan, mereka perjuangkan, dan mereka cita-citakan bersama (Van Niel, 1984; dan Frederick, 1989). Wacana dan cita-cita nasionalisme tentang bayangan “Indonesia modern di masa depan” apakah akan mengiktui “jalan Barat” atau “jalan Timur” misalnya, didiskusikan dan diperdebatkan secara luas melalui media massa oleh golongan elite baru ini pada tahun 1910-an sampai dengan tahun 1930-an, terutama antara dr.

Tjipto Mangoenkoesoemo, Soewardi Soerjaningrat, dr. Soetomo, Soetan Takdir Alisjahbana, Soetatmo, Sanoesi Pane, dan lain-lain (Scherer, 1985; dan Mihardja ed., 1986).

Begitu juga dengan semangat nasionalisme dan pembelaan terhadap golongan pribumi yang tertindas dilakukan oleh golongan elite baru Indonesia ini – seperti H.O.S. (Haji Oemar Said) Tjokroaminoto, H. Agoes Salim, Abdoel Moeis, Haji Misbach, Mas Marco Kartodikromo, Soerjopranoto, dan lain-lain – baik melalui perjuangan mereka di *Volksraad*, parlemen buatan kolonial Belanda, maupun melalui aksi-aksi boikot, pemogokan, dan protes sosial pada tahun 1910/1920-an (Pringgodigdo, 1984; dan Shiraishi, 1997). Dan akhirnya, arah dari perjuangan pergerakan nasional Indonesia melawan pihak kolonial Belanda, apakah akan dilakukan dengan cara-cara kooperatif atau non kooperatif juga diperdebatkan secara keras pada tahun 1920/1930-an antara kubu Soekarno, Hatta, dan Syahrir di satu sisi dengan kubu Soetardjo, Thamrin, Wiwoho di sisi lain (Abeyasekere, 1976). Wacana, program, dan aksi-aksi dari golongan nasionalis Indonesia ini disosialisasikan dengan berbagai cara, terutama melalui media massa, serta hanya bisa dilakukan oleh golongan elite baru Indonesia yang modern, bukan oleh golongan elite lama yang konservatif dan tradisional.

Dalam konteks ini adalah menarik untuk melihat perbedaan teori nasionalisme antara *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* yang ditulis oleh Benedict R.O’G. Anderson dengan *Discourses et Conferences* yang dikemukakan oleh Ernest Renan atau dengan *Nationalism: Its Meaning and History* yang ditulis oleh Hans Kohn. Mereka melihat bagaimana proses nasionalisme itu tumbuh dan berkembang. Bagi Ernest Renan, misalnya, substansi nasionalisme adalah keinginan sekelompok manusia untuk bersatu dan membentuk bangsa; atau dalam kata-kata Renan yang terkenal, “*le desire d’etre ensemble*” (dalam Wiriaatmadja, 2002:165). Dan bagi Hans Kohn, nasionalisme adalah: “*a state of mind, in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state*” atau suatu pemikiran yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara bangsa (Kohn, 1965). Baik Ernest Renan maupun Hans Kohn memfokuskan perhatiannya pada pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme di Eropa (negara-negara Barat) sejak abad ke-18, terutama sejak Revolusi Perancis 1789, sampai dengan abad ke-20.

Sementara itu bagi Benedict R.O’G. Anderson (1983), nasionalisme adalah “*an imagined political community*” atau sebuah komunitas politik yang dibayangkan; dalam artian bahwa nasionalisme itu sebagai sesuatu yang dibayangkan dan dibentuk dalam tataran ide dan gagasan yang kemudian disosialisasikan dan diperjuangkan perwujudannya dalam tataran kenyataan. Benedict R.O’G. Anderson juga – berbeda dengan

Ernest Renan maupun Hans Kohn – lebih memfokuskan kajiannya pada pertumbuhan dan penyebaran nasionalisme di negara-negara berkembang baik di Asia, Afrika, maupun di Latin Amerika. Lagi pula jika Ernest Renan dan Hans Kohn lebih membahas pada “apa itu nasionalisme”, maka Benedict R.O’G. Anderson lebih pada “bagaimana dan melalui apa nasionalisme itu menyebar dan berkembang”. Menurut Benedict R.O’G. Anderson (1983:107-111), nasionalisme di negara-negara berkembang itu pada mulanya terbentuk dan disebarluaskan melalui *print capitalism*, teknologi cetak, bahasa nasional, kesatuan birokrasi, dan arus modernisasi yang menyebabkan terjadinya mobilitas dan perubahan sosial.

Dengan begini, menurut Benedict R.O’G. Anderson (1983), berbeda dengan di negara-negara Barat, maka nasionalisme di negara-negara berkembang adalah suatu fenomena baru yang tidak ada presedennya di masa lalu. Karakteristik nasionalisme ditandai oleh penyebaran yang unik namun massal, baik melalui bahasa daerah, bahasa nasional, dan bahasa penjajah di sekolah-sekolah; melalui media massa dan karya sastra; melalui birokrasi dan kesatuan administrasi pemerintahan yang terpusat; maupun melalui jaringan transportasi dan komunikasi di pusat-pusat kota yang modern.

Peranan media massa memang sangat besar didalam mensosialisasikan “semangat kebangsaan” di Indonesia. Hal dikarenakan antara “pergerakan nasional” di satu sisi dengan “media massa atau pers” di sisi lain – meminjam istilahnya Sartono Kartodirdjo (1987), sejarawan terkenal Indonesia – laksana saudara kembar yang tak mungkin terpisahkan. Para tokoh pergerakan nasional untuk mensosialisasikan ide-ide, tujuan, cita-cita, harapan, dan bayangan tentang nasionalisme Indonesia di satu sisi, dan di sisi lain untuk merealisasikan visi, misi, dan proyek nasionalisme itu mereka membentuk organisasi sosial-politik modern dengan pers, khususnya surat kabar, sebagai corong organisasi.

Melalui pers yang memiliki fungsi *news and views* itu tidak hanya disajikan berita-berita yang bersifat faktual dan peristiwa-peristiwa yang penting pada zamannya; tetapi juga dikemukakan pandangan-pandangan, pendapat, sikap, dan kritik sosial kepada publik tentang kejadian dan persoalan yang dinilai penting dan aktual pada zamannya (Suwirta, 2001). Sajian *news and views* dari pers itu kemudian laksana “makhluk berkaki seribu” yang menyebar luas, berjalan jauh, dan menyelinap dalam di tengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga terbentuk *image* sosial dan opini publik. Inilah proses terbentuknya nasionalisme yang digambarkan secara tepat oleh Ben Anderson sebagai “*an imagined political community*” itu (Anderson, 1983).

Sejak awal pertumbuhannya, pers Indonesia – baik yang berbahasa daerah, bahasa Melayu, maupun bahasa Belanda – memiliki peranan yang signifikan dalam menggagas, mencita-citakan, dan mewujudkan

bangunan negara kebangsaan yang maju, mandiri, merdeka, bermartabat, dan berkeadilan sosial, sebagai lawan dari entitas negara kolonial yang konservatif, diskriminatif, represif, dan eksploitatif (Adam, 1995). Dan setiap organisasi pergerakan nasional memiliki pers sebagai media komunikasinya masing-masing, seperti Budi Utomo memiliki media *Retnodhoemilah*, *Darmokondo*, dan *Goeroe Desa*; Sarekat Islam memiliki media *Oetoesan Hindia*, *Kaoem Moeda*, *Pantjaran Warta*, *Sinar Djawa*, dan *Medan Moeslimin*; Indische Partij memiliki media *De Express*, *Het Tijdschrift*, *Tjahaja Timoer*, dan *Persatoean Hindia*; Muhammadiyah memiliki media *Pandji Islam*, *Penaboer*, dan *Adil*; Perhimpunan Indonesia memiliki media *Indonesia Merdeka*; dan Partai Nasional Indonesia memiliki media *Fikiran Ra'jat* dan *Daulat Ra'jat* (Hoogerwerf, 1990; dan Suwirta, 2000).

Akhirnya Benedict R.O'G. Anderson (1984), sekali lagi, menunjukkan analisisnya yang menarik ketika melihat nama-nama surat kabar di Indonesia pada awal abad ke-20 yang banyak menggunakan kata: “*sinar*”, “*tjahaja*”, “*pantjaran*”, “*madjoe*”, “*bangoen*”, “*moeda*”, “*persatoean*”, “*adil*”, dan “*merdeka*” yang kesemuanya itu mengandung gagasan dan cita-cita tentang negara kebangsaan (*nation state*) Indonesia di masa depan yang penuh dengan harapan, kemajuan, kesejahteraan, keadilan sosial, kemerdekaan, dan integrasi nasional.

TANTANGAN ABAD KE-21: ANTARA NASIONALITAS DAN ETNISITAS

Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai dengan adanya fenomena baru, yakni disintegrasi negara nasional di satu sisi serta maraknya gerakan nasional yang berbasis etnisitas di sisi lain. Dalam konteks ini “etnisitas”, menurut P.L. Van den Berghe (1981), merupakan semangat keterkaitan komunitas yang sah-sah saja kehadirannya di panggung sejarah. Bagaimana negara-negara nasional, termasuk Indonesia, yang bercorak nasional-sentris ini menghadapi fenomena munculnya gerakan primordial yang berbasis etno-sentrisme, nampaknya perlu difahami juga masalah etnisitas ini dari berbagai perspektif.

Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa: “... *all humans are members of single species within it. 'Races' are social constructs corresponding to no biological reality*”, yang maksudnya adalah secara esensial umat manusia itu berasal dari sumber spesies yang sama. Pengkategorian terhadap ras semata-mata berdasarkan karakteristik biologis semata yang bersifat jelas dan tetap. Para ilmuwan, dengan demikian, menjelaskan ras sebagai sub spesies dari manusia, yaitu sebagai bagian-bagian dari spesies genus *Homo Sapiens* (Wiriaatmadja, 1992:86).

Menurut Linnaeus, paling tidak ada 4 ras berdasarkan lokasi geografisnya di planet bumi ini, yaitu: *ras afer* di Afrika, *ras americanus* di Amerika, *ras*

asiaticus di Asia, dan *ras europeanus* di Eropa. Sedangkan Blumenbach, memberikan label pada ras itu berdasarkan pada warna kulitnya, yaitu: ras hitam seperti Ethiopia, ras coklat seperti Melayu, ras merah seperti Amerika, ras putih seperti Kaukasia, dan ras kuning seperti Mongolid (dalam Wiriaatmadja, 1992:87).

Bagaimanapun, ras merupakan pengkategorian dengan menggunakan baik konsep biologis maupun konsep sosial. Sebab, menurut Redfield dan Van den Berghe, walaupun secara umum orang cenderung memberikan ketentuan-ketentuan biologis kepada pengertian ras, namun batasan-batasan tentang ras itu sendiri merupakan hasil dari konstruksi sosial yang ditentukan berdasarkan persetujuan bersama. Mungkin karena kekaburan dalam mendefinisikan tentang ras, maka banyak ahli sosiologi dan antropologi yang mengantinya dengan istilah *etnik* atau *kelompok etnik*. Alasan penggunaan istilah baru ini adalah selain didasarkan kepada karakteristik fisik, juga ciri-ciri kultural yang signifikan dipakai sebagai pembeda kelompok-kelompok tersebut (dalam Wiriaatmadja, 1992:88).

P.L. Van den Berghe, dalam bukunya *The Ethnic Phenomenon* (1981), menjabarkan konsep ras dan etnisitas berdasarkan perspektif dan prinsip-prinsip sosio-biologi. Menurutnya, secara sosio-biologi pada hakekatnya perilaku manusia itu sama dan melampaui berbagai macam kebudayaan (*transcultural*). Karenanya P.L. Van den Berghe sampai pada sebuah kesimpulan yang liberal dan demokratis, yakni bahwa umat manusia itu sebenarnya sama dan merupakan kesatuan, sedangkan perbedaan ras tidaklah berarti dan tidak signifikan bila dibandingkan dengan kesatuan tersebut (Van den Berghe, 1981; dan Wiriaatmadja, 1992).

Selanjutnya P.L. Van den Berghe (1981) menyatakan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh tiga unsur penting di mana unsur yang satu berhubungan erat dengan unsur lainnya, yaitu: (1) gene-gene, (2) lingkungan ekologi, dan (3) kebudayaan. Penjelasannya adalah bahwa gene-gene itu diseleksi melalui tekanan-tekanan lingkungan, dan hasilnya pada gilirannya berpengaruh terhadap budaya. Begitu juga sebaliknya, kebudayaan berkembang dari evolusi biologis dan memberikan tanggapan terhadap tekanan-tekanan lingkungan. Begitu juga halnya bahwa kebudayaan berpengaruh terhadap ekologi, sehingga pada gilirannya berpengaruh terhadap proses evolusi biologis di planet bumi ini.

Masih menurut P.L. Van den Berghe (1981), berdasarkan perspektif teori sosio-biologi bahwa *ethnocentrism* dapat dijelaskan sebagai: “*extensions of kinship [...] deeply rooted in our biology, and can be expected to persist in industrial societies, wether capitalis or socialist*” atau perluasan dari kekerabatan [...] mengakar secara mendalam dalam biologis kita, dan diperkirakan akan tetap bertahan baik dalam masyarakat industri kapitalis maupun sosialis. Ideologi liberal sendiri memandang etnosentrisme sebagai kuno, sisa-sisa irrasional dari masyarakat pra industri, yang diperkirakan

tetap ada di mana-mana di bawah kondisi-kondisi modernisasi. Contoh yang paling nyata dari fenomena etnosentrisme ini barangkali adalah: etnis Indian di Amerika Serikat, dan etnis Aborigin di Australia, atau etnis Baduy, Tengger, dan Kubu-Lubu di Indonesia (Syuroh, 2011).

Sementara itu, dalam kaitan antara eksistensi etnisitas dan nasionalitas, para ahli menggunakan hukum alam dalam konteks *Social Darwinism*. Istilah *Social Darwinism* sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh tokoh Sosiologi, Herbert Spencer, pada abad ke-19 (Brinton, 1985:205-209). Dengan istilah ini ingin ditunjukkan bahwa teori-teori ilmiah Darwin di bidang biologi bisa difahami, diinterpretasi, dan diaktualisasikan dalam konteks kehidupan sosial. Dengan perkataan lain, istilah “*Social Darwinism*” sesungguhnya mengacu kepada kenyataan bahwa keberadaan dan kelangsungan hidup individu dan atau kelompok manusia mengikuti pola seleksi sosial yang dalam perkembangan selanjutnya hanya individu dan atau kelompok sosial yang kuat dalam perjuangan hidup yang akan tetap bertahan dan berkembang (Suwirta, 2005).

Pandangan P.L. Van den Berghe (1981) tentang *Social Darwinism* lebih jelas lagi karena perspektifnya tentang perkembangan ras dan etnisitas didasari oleh teori-teori tentang sosio-biologi. Menurut P.L. Van den Berghe, dan juga ahli-ahli etnisitas lain, bahwa manusia itu – seperti organisme lainnya – berevolusi secara biologis berdasarkan seleksi alam; manusia juga berevolusi dengan menyesuaikan diri dengan lingkungan alam; dan akhirnya manusia juga berevolusi terhadap kebudayaan yang diciptakan dan dilestiasikannya sendiri sebagai media modifikasi, kreasi, dan persuasi (Berghe, 1981; Glazer & Moynihan eds., 1981; dan Wiriaatmadja, 1992).

Contoh tentang *Social Darwinism* ini pernah diterapkan secara ekstrim oleh Adolf Hitler di Jerman pada Perang Dunia II (1939-1945) dengan cara mengagung-agungkan ras Arya-Jerman yang superior di satu sisi, dan di sisi lain menegasikan – melalui usaha *genocide* – ras Yahudi dan ras lainnya di dunia yang dinilai inferior (Sutondo, 2012). Sebuah paradigma berpikir dan bertindak yang ternyata mengakibatkan penderitaan umat manusia, karena mungkin sifatnya yang tidak lagi alamiah dan ilmiah, tetapi penuh dengan dogma dan rekayasa.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, masalah etnisitas ini menggejala secara kuat setelah era Reformasi (1998). Konflik yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) terjadi di banyak daerah dan pemerintah seolah-olah tidak berdaya menghadapinya. Kasus lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 2009 juga menjadi peringatan serius bagi bangsa Indonesia bahwa masalah etnisitas dan nasionalitas bisa mengancam integrasi nasional (Nurjaman, Suwirta & Kamsori, 2012). Begitu juga dengan masalah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang dalam banyak hal menyangkut kepentingan etnisitas dan nasionalitas juga.

KESIMPULAN

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa genesis dan perkembangan nasionalisme di Indonesia melalui proses sejarah yang panjang dan dinamis. Pengenalan sistem pendidikan modern pada awal abad ke-20 telah melahirkan golongan elite terdidik dan cendekiawan yang tercerahkan. Sekat-sekat etnisitas mulai mencair dan gambaran imajiner tentang negara-bangsa yang bernama “Indonesia” mulai dibayangkan, diwacanakan, dan diperjuangkan agar menjadi kenyataan sejarah. Puncak perjuangan itu terwujud dengan lahirnya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pemikiran dan gerakan nasionalisme yang bercorak sentripetal pasca pembentukan negara-bangsa memang bisa menekan gejala etnisitas yang bersifat sentrifugal. Proses modernisasi dan pembangunan pasca kemerdekaan juga melahirkan banyak harapan agar Indonesia merupakan “proyek bersama” bagi semua anak bangsa untuk mencapai kemajuan, kesejahteraan, dan kemerdekaan yang sejati. Sementara itu, orientasi kekuasaan yang terpusat dan otoriterianisme dalam proses pembangunan telah melahirkan gejala ketidakpuasan yang ditopang oleh akar-akar etnisitas yang kembali menguat.

Akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 M (Masehi), Indonesia mengalami proses demokratisasi yang luar biasa. Gejala etnisitas memang semakin menguat, tapi pada waktu yang sama muncul bentuk nasionalitas baru yang lebih demokratis – dimana ruang untuk mendapatkan kesempatan berusaha dan kekuasaan politik dibuka lebar – dan pada gilirannya mengarah ke proses integrasi nasional. Masalah etnisitas, nasionalitas, dan integrasi nasional di Indonesia memiliki konteks historis yang khas. Pada akhirnya, diperlukan kearifan sejarah dalam arti mau belajar dari pengalaman masa lalu – di samping tetap mencermati konsep kekinian dan kedisisian – yang bisa mewujudkan Indonesia menjadi negara-bangsa yang maju, sejahtera, dan merdeka bagi semua anak bangsa di masa depan.

Bibliografi

- Abeyasekere, Susan. (1976). *One Hand Clapping: Indonesian Nationalists and the Dutch, 1939-1942*. Monash: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.
- Adam, Ahmat. (1995). *The Vernacular Press and the Emergence of Modern Indonesian Consciousness, 1855-1913*. Ithaca, New York: Cornell University.
- Adam, Ahmat. (2002). “Perjuangan Demokrasi dalam Sejarah Indonesia: Suatu Perbincangan Ide-ide Kemerdekaan Sebelum Perang Dunia II” dalam *HISTORIA: Jurnal Pendidikan*

- Sejarah*, No.6, Vol.III (Desember). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Anderson, Benedict R.O'G. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Anderson, Benedict R.O'G. (1984). "Suatu Waktu Gelap dan Terang Benderang: Pemikiran Nasionalis Indonesia pada Awal Abad ke-20" dalam Anthony Reid & David Marr [eds]. *Dari Raja Ali Haji hing Hamka*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
- Anderson, Benedict. (2002). *Hantu Komparasi: Nasionalisme, Asia Tenggara, dan Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, Terjemahan.
- Bresnan, John. (1993). *Managing Indonesia: The Modern Political Economy*. New York: Columbia University Press.
- Brinton, Crane. (1985). "Sejarah Intelektual" dalam Taufik Abdullah & Abdurrachman Surjomihardjo [eds]. *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Brugmans, I.J. (1938). *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlands Indie*. Groningen-Batavia: J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V.
- Brugmans, I.J. (1987). "Politik Pengajaran" dalam H. Baudet & I.J. Brugmans [eds]. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.
- Deutsch, Karl W. (1984). "The Growth of Nations: Some Eccurent Patterns of Political and Social Integration" dalam MacAllister [ed]. *Southeast Asia: The Politics of National Integration*. New York: Random House Inc.
- Frederick, William F. (1989). *Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya, 1926-1946)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Terjemahan.
- Gandhi, Leela. (2001). *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, Terjemahan.
- Glazer, Nathan & Daniel P. Moynihan [eds]. (1981). *Ethnicity: Theory and Experience*. London: Harvard University Press.
- Hoogerwerf, Evert-Jan. (1990). *Persgeschiedenis van Indonesie tot 1942: Geannoteerde Bibliografie*. Leiden: KITLV Press.
- Kahin, Goerge McTurnan. (1970). *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Kartodirdjo, Sartono. (1987). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi di Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono. (1993). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme hingga Nasionalisme, Jilid 2*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kohn, Hans. (1965). *Nationalism: Its Meaning and History*. Florida: Robert E. Kriger Publ. Company.
- Laucer, Robert H. (2001). *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Rineka Cipta, terjemahan.
- Marlina D., Ietje. (2001). "Peranan Bupati Wiratanuningrat (1908-1937) dalam Memajukan Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Tasikmalaya, Jawa Barat" dalam *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.3, Vol.II (Juni). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- May, Brian. (1978). *The Indonesian Tragedy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Mihardja, Achdiat K. [ed]. (1986). *Polemik Kebudayaan*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, cetakan keempat.
- Nurjaman, Andi Suwirta & Moch Eryk Kamsori. (2012). "From Bullet to the Ballot: A Case Study of the East Timor's Referendum as Viewed by Newspapers of *Kompas* and *Republika* in Jakarta" dalam *TAWARIKH: International Journal for Historical Studies*, Vol.5(1) Oktober, hlm.103-122.

- Pringgogidgo, A.K. (1984). *Sejarah Pergerakan Nasional Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Rawiyae, Yorris. (2002). *Mengapa Papua Ingin Merdeka?* Jakarta: Solidamor.
- Ritzer, George. (1992). *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill, Inc., third edition.
- Robison, Richard. (1990). *Power and Economy in Suharto's Indonesia*. Manila and Wollongong: Journal of Contemporary Asia Publishers.
- Scherer, Savitri Prastiti. (1985). *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Selden, Roman & Peter Widdowson. (1993). *Contemporary Literacy Theory*. Lexington: University Press of Kentucky.
- Shiraishi, Takashi. (1997). *Zaman Bergerak: Radikalisme di Jawa, 1912-1926*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan.
- Sjamsuddin, Helius. (1998). "Model Tarik-Ulur Daya Sentripetal – Daya Sentrifugal dalam Sejarah Indonesia: Sebuah Wacana Pendekatan Integratif" dalam *Mimbar Pendidikan*, No.3, Th.XII. Bandung: University Press IKIP Bandung.
- Soewarsih. (1979). *Manusia Bebas*. Jakarta: Penerbit Djambatan, Terjemahan.
- Sulaeman, M. Isya. (2002). "Darul Islam dan Gerakan Aceh Merdeka: Suatu Tinjauan Komparatif Dua Kasus Perlawanan di Aceh" dalam *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.5, Vol.III (Juni). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Supriatna, Nana. (2002). "Patronase dan Mobilitas Sosial: Kasus Masyarakat Sumedang pada Akhir Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20" dalam *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, No.5, Vol.III (Juni). Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI.
- Sutherland, Heather. (1984). *Terbentuknya Elite Birokrasi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Terjemahan.
- Sutondo, Agus. (2012). "Pelarian para Yahudi dan Kematian Hitler di Indonesia" dalam <http://sejarah.kompasiana.com/2012/02/05/pelarian-para-yahudi-dan-kematian-hitler-di-indonesia-436486.html> [diakses di Bandung, Indonesia: 14 Desember 2012].
- Suwirta, Andi. (2000). "Pers dan Nasionalisme di Indonesia: Sebuah Perspektif Sejarah" dalam *Mimbar Pendidikan*, No.4. Bandung: University Press IKIP Bandung.
- Suwirta, Andi. (2001). *Revolusi Indonesia dalam News and Views: Sebuah Antologi Sejarah*. Bandung: Suci Press.
- Suwirta, Andi. (2005). *Sejarah Intelektual: Percikan Pemikiran dari Dunia Barat dan Islam*. Bandung: Historia Utama Press.
- Syuroh, Mat. (2011). "Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing di Indonesia" dalam *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.4(2) November, hlm.229-248.
- Toer, Pramoedya Ananta. (1985). *Bumi Manusia*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. (1986). *Jejak Langkah*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. (1987). *Anak Semua Bangsa*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Toer, Pramoedya Ananta. (1988). *Rumah Kaca*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Van den Berghe, P.L. (1981). *The Ethnic Phenomenon*. New York: Elsevier.
- Van Niel, Robert. (1984). *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, Terjemahan.
- Winters, Jeffrey. (1999). *Dosa-dosa Politik Orde Baru*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Wiriaatmadja, Rochiati. (1992). "Peranan Pengajaran Sejarah Nasional Indonesia dalam Pembentukan Identitas Nasional". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Bandung: Program Studi Pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) Pascasarjana IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Bandung.
- Wiriaatmadja, Rochiati. (2002). *Pendidikan Sejarah di Indonesia: Perspektif Lokal, Nasional, dan Global*. Bandung: Historia Utama Press.